

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, Nata (2017). *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Duadji, Noverman. (2012). *Good Governance* dalam pemerintahan Daerah. *Mimbar*, Volume 28 (2), 201-209.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik) (Bagian 3)*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurwahida. AW, Aisah Hamzah, Alwy Arifin. (2012). Hubungan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dengan Kinerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahu 2012.
- Prasojo, Eko & Teguh Kurniawan. (2008). Reformasi Birokrasi Dan *Good Governance: Kasus Best Practices* Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia.
- Wardani, Marita Kusuma & Ahmad Shofwan Fauzi. (2018). Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suworejo Karanganyar. *Among Makartii*, Volume 11 (22).
- Mardiasmo, (2006). Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 (1).
- Sabarno, Hari. (2007) *Memandu Otonomi Daerah Dan Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zeithaml, V. et al. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectation*. The Free Press, New York.
- Alex, Go. (2014). Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada t. Surya Jaya Bangun Abadi (*Terwaralaba Ray White*). *Agora*, Volume 2 (2).
- Solomon, J.F., Solomon, A., and Park, C. 2002. *The role of institutional investors in corporate governance reform in South Korea: Some empirical evidence*. *Corporate Governance: An International Review*, 10 (3), July: 211 - 224.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Halim, Abdul. (2007). *Auntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Solihin, Dadang. 2007. *Penerapan Good Governance Di Sektor Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*.
- Sulistoni, G. (2003). *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.
- Dwiyanto, Agus. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maryam, Neneng Siti. (2016). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*. Volume 6 (1).
- Dwiyanto, Agus. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moeloeng. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saryono.(2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sanusi, Anwar. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Dan Pengembangan: Research And Development*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Gayatri. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 2.
- Tumbel, Satria Mentari. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Politico*. Volume 6 (1).
- Soekarno, Adrian. (2019). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Volume 4 (4).

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Rincian Alokasi Dana Desa. dalam www.djpk.depkeu.go.id yang diakses pada 30 November 2019.

Kompasiana, Kajian Literatur *Good Corporate Governance*. Dalam www.kompasiana.com/kajian-literatur-good-corporate-governance/ yang diakses pada 3 April 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Taun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.